

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis yang ada dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. Semakin besar nilai dewan komisaris independen memiliki arti bahwa semakin besar pula proporsi dewan komisaris yang tidak memiliki tujuan dalam perusahaan. Hal ini, membantu perusahaan memiliki *monitoring* atau sistem pengawasan terhadap kinerja manajerial dan membantu meminimalkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Penelitian ini didukung oleh hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Said et al., 2009) dan (Eng & Mak, 2003) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi keputusan manajemen perusahaan.

2. Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. Seorang komite audit yang memiliki pengalaman maupun kompetensi dibidangnya akan cenderung memiliki kinerja yang baik. Komite audit yang berkompeten akan meminimalkan konflik kepentingan yang ada di perusahaan. Komite audit yang berkompeten akan lebih mudah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh para manajer, dengan begitu komite audit bisa mendorong manajerial dalam bersikap transparan terhadap kinerja dan pelaporan keuangannya. Penelitian ini didukung oleh hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pernyataan analisis dalam penelitian ini di dukung oleh penelitian

yang dilakukan oleh (Chemmanur & Paeglis, 2005) yang menyatakan bahwa seorang yang memiliki pengalaman cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Pengalaman serta kompetensi yang ada bisa mendorong manajemen dalam meningkatkan kualitas dari perusahaan. Hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (dyah ayu & hartomo, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit yang ada di perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan dari kebijakan anti korupsi perusahaan.

3. Struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan. Struktur kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan cenderung dimiliki oleh beberapa institusi yang tidak langsung berhubungan dalam kinerja manajerial. Pengelompokan institusional yang ada pada kepemilikan institusional adalah institusi yang berjalan dalam bidang pendanaan dan berfokus pada profit atau keuntungan perusahaan dibandingkan kebijakan yang anti korupsi yang ada dalam perusahaan. Institusional yang memiliki kepemilikan saham perusahaan lebih fokus terhadap profit yang didapatkan daripada melihat pengawasan dalam perusahaan.

4. Stuktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial yang ada didalam perusahaan memiliki rata-rata nilai yang berada di bawah 10% yang artinya kepemilikan manajerial yang ada kurang untuk mempengaruhi keputusan hasil dari perusahaan. Hal itu menyebabkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.

5. Struktur kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi di perusahaan. Struktur kepemilikan *blockholder* yang ada dalam penelitian ini didukung oleh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Seifert et al (2005) yang mengatakan bahwa kepemilikan *blockholder* secara potensial bisa mengurangi adanya konflik keagenan yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham yang ada di perusahaan, hal ini dikarenakan kepemilikan *blockholder* bertindak sebagai pemegang saham mayoritas memegang kendali terhadap kinerja manajer dalam perusahaan, yang membuat tindakan manajer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang saham.

Hal ini di perkuat dengan hasil statistic deskriptif yang mengatakan bahwa kepemilikan saham yang ada dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi didominasi oleh kepemilikan saham yang bernilai 5% atau lebih. Nilai rata-rata yang ada pada variabel kepemilikan saham *blockholder* sebesar 70% dibandingkan dengan kepemilikan saham yang memiliki nilai dibawah 5% yang hanya mempengaruhi sebesar 30%. Perbedaan yang cukup signifikan antara kepemilikan *blockholder* dengan kepemilikan saham lainnya membuat *blockholder* memiliki hak suara untuk memberikan pendapat perihal kebijakan yang ada pada perusahaan.

5. Tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik bisa meminimalkan adanya konflik keagenan yang ada di perusahaan. Hasil dari penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Besari (2009) dan juga Law (2011) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan bisa meminimalkan adanya kecurangan dan perbedaan kepentingan yang ada di perusahaan. Penetapan tata

kelola perusahaan yang baik pada perusahaan dapat meminimalkan terjadinya kecurangan atau perbedaan kepentingan yang ada antara *agent* dan *principal*.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian ini, ada beberapa saran yang bisa diberikan pada penelitian ini antara lain adalah hal sebagai berikut:

1. Pada hipotesis dewan komisaris independen rata-rata perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris yang independen sudah berada di atas peraturan yang ditetapkan oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan PJOK yaitu sebesar 30%. Akan lebih baik bagi pemerintahan untuk bisa menambahkan batas minimum dewan komisaris yang independen untuk meningkatkan kebijakan anti korupsi perusahaan agar semakin baik karena dewan independensi dewan komisaris yang ada mempengaruhi perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.

2. Pada hipotesis komite audit yang memiliki kompetensi di bidang audit juga menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan bagi pemerintah untuk meningkatkan batas minimum kewajiban perusahaan memiliki komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, mengingat hipotesis komite audit yang berkompeten berpengaruh positif terhadap perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.

3. Perusahaan sebaiknya meningkatkan dan memfokuskan pada hal-hal yang berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan seperti meningkatkan komite audit yang memiliki kompetensi komite audit dengan memilih dan memutuskan anggota komite audit perusahaan yang memiliki bidang

akuntansi dan keuangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tata kelola perusahaan yang ada, dengan meningkatkan 5 asas tatakelola perusahaan bisa meningkatkan kebijakan anti korupsi dalam perusahaannya.

4. Pemegang saham *blockholder* dengan diterimanya hipotesis struktur kepemilikan *blockholder* yang ada pada perusahaan, maka saran untuk para pemegang saham yang berada diatas 5% untuk menggunakan hak suaranya dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk meningkatkan kebijakan anti korupsi yang ada pada perusahaan tersebut.

### 5.3 Keterbatasan riset

1. Nilai R-squared yang ada pada penelitian ini tergolong cukup rendah dengan hasil sebesar 0.16 yang berarti kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen hanya sebesar 0.16, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian karena Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yang mempengaruhi kebijakan anti korupsi, yaitu dewan komisaris independen, komite audit, struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder*, struktur kepemilikan institusional. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kebijakan anti korupsi, seperti CSR, sustainability reporting.

2. Adanya keterbatasan pengujian dalam mengakses laporan keuangan perusahaan sampel yang beberapa sudah tidak bisa diakses baik melalui IDX maupun website yang ada. Hal ini membuat pengurangan sampel dari Sektor perdagangan, jasa dan investasi.

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan diluar sektor manufaktur. Maka disarankan untuk penelitian mendatang dapat menggunakan perusahaan disektor non manufaktur.

